



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Reviu Tahun 2024

PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat serta karunia-Nya, sehingga Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut tahun 2020-2024 tahun 2024 dapat kami selesaikan. Perubahan merupakan sesuatu yang harus disikapi dengan penuh keyakinan dan kehati-hatian. Harapan dari para stakeholders merupakan peluang-peluang yang harus selalu kita respon dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan kualitas yang merupakan komitmen kita sebagai lembaga pemerintahan.

Rencana Strategis Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut disusun melalui berbagai tahapan, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci dalam pengembangan kompetensi SDM sektor transportasi laut, juga isu-isu strategis yang terjadi dan diprediksi akan terjadi.

Rencana Strategis Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (reviu tahun 0224) ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor SDM perhubungan laut yang diwujudkan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Hal ini disusun sebagai pijakan kebijakan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi selama masa pelaksanaan anggaran di tahun 2020 hingga 2024, sehingga kegiatan-kegiatan rutin maupun kegiatan tambahan yang mendesak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara transparan dan terukur.

Rencana Strategis Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut tahun 2020-2024 (reviu tahun 20224) diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya kami mengharapkan adanya masukan dan saran untuk penyempurnaan.

Jakarta, 25 Juli 2024

Kepala Pusat Pengembangan SDM
Perhubungan Laut



Dr. Ir. Ahmad, M.MTr., QIA., CFr.A.
NIP. 19670317 199403 1 001

Daftar Isi

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Gambaran Umum.....	I-1
B. Dasar Hukum	I-6
C. Maksud dan Tujuan	I-7
D. Program dan Kegiatan	I-8
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015-2018	II-1
A. Capaian Kinerja Tahun 2015-2018.....	II-1
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN.....	III-1
A. Identifikasi Analisis SWOT.....	III-1
B. Analisis SWOT	III-2
C. Pemetaan Posisi	III-7
BAB IV BAB IV RENCANA STRATEGIS LIMA TAHUN	IV-1
A. Isu-isu Strategis.....	IV-1
1. Kebutuhan SDM Bidang Transportasi.....	IV-1
2. Perkembangan Lingkungan Strategis : Industry 4.0.....	IV-4
3. Perkembangan Teknologi Informatika.....	IV-5
4. Transformasi kelembagaan.....	IV-5
5. Kebijakan Pemerintah.....	IV-6
B. Visi Misi Organissasi 2020-2024	IV-10
C. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan	IV-10
D. Indikator Kinerja Tahun 2020-2024	IV-26
E. Kegiatan Utama Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	IV-27
1. Pengembangan SDM.....	IV-27
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana.....	IV-28
3. Tenaga Pendidik dan Kependidikan.....	IV-28
4. Status Kelembagaan dan Pengembangan Prodi.....	IV-29
5. Kurikulum dan Silabus.....	IV-30
6. <i>Quick Wins</i>	IV-31
Kerangka Pendanaan	IV-32
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Peran transportasi berada pada posisi yang strategis dan vital dalam kehidupan dan seluruh aktifitas masyarakat. Transportasi berperan dalam mengakomodasi mobilitas kegiatan bidang ekonomi, kehidupan sosial, budaya, serta aktifitas lain masyarakat yang penting. Peran transportasi akan lebih dirasakan dan dibutuhkan jika melihat dari beberapa aspek diantaranya jumlah penduduk yang besar maupun kondisi geografis Indonesia.

Besarnya jumlah penduduk yang dimiliki oleh Indonesia yang mencapai lebih dari 278,7 juta jiwa (medio 2023) menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), menempatkan Indonesia berada pada urutan keempat terbesar di dunia (3.46% dari penduduk dunia) setelah India, China, dan USA. Konsekuensi dari besarnya jumlah penduduk adalah munculnya kebutuhan (need) akan mobilitas berupa jasa transportasi untuk memenuhi dan meningkatkan aktifitasnya. Selain jumlah penduduk yang besar, hal itu juga ditambah pula dengan tingkat sebaran penduduk yang tidak merata.

Disamping jumlah penduduk, kondisi geografis Indonesia memiliki karakteristik yang berupa daratan kepulauan dan wilayah perairan laut yang luas. Wilayah perairan laut maupun sungai yang mendominasi gambaran wilayah Indonesia merupakan salah satu kondisi yang dapat diidentifikasi sebagai situasi yang membutuhkan aktifitas transportasi untuk memindahkan penumpang dan/atau barang antar wilayah daratan yang terpisah tersebut.

Peranan transportasi menjadi lebih strategis akibat adanya pengaruh globalisasi dan persaingan perdagangan yang semakin kompetitif. Dampak pengaruh globalisasi juga menyentuh peran transportasi darat, laut, dan udara. Efisiensi dan efektifitas jasa transportasi merupakan kunci dalam memasuki persaingan pasar global. Transportasi yang efektif dan efisien pada akhirnya menghasilkan penekanan biaya produksi yang semakin rendah maupun menjual produk pada harga produk lebih rendah dalam upaya memenangi kompetisi. Dinamika perkembangan transportasi yang mampu memberikan nilai tambah yang optimal tidak dapat dilepaskan dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan dalam perencanaan, pengelolaan/ manajemen, dan pengawasan transportasi.



Dinamika perkembangan jasa transportasi terkait erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi transportasi yang demikian cepat bersinergi dengan globalisasi. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan warna dalam perkembangan transportasi di dunia dan/atau di Indonesia.

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Terwujudnya pelayanan transportasi yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksananya.

Diperlukan SDM yang memiliki kemampuan untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Dalam hal ini, SDM yang dibutuhkan tidak hanya pada tataran "menghadapi" tetapi harus menghasilkan SDM yang mampu berada pada posisi "leading" dalam memasuki pertarungan persaingan yang sangat kompetitif.

Pembangunan berkelanjutan infrastruktur transportasi yang senantiasa dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari upaya untuk senantiasa mengembangkan dan meningkatkan pelayanan mobilitas masyarakat. Peningkatan pelayanan mobilitas tersebut adalah salah satu kewajiban pemerintah bagi warga negaranya.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur merupakan upaya untuk menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan peluang usaha jasa transportasi. Peluang usaha dalam pengertian yang mencakup kemampuan transportasi untuk meningkatkan/ mendorong nilai tambah sumber daya yang potensial di daerah maupun secara nasional.

Penyempurnaan peraturan perundangan sebagai upaya antisipasi/ menghadapi pengaruh global merupakan bagian dari langkah sektor transportasi terintegrasi dengan aktifitas global. Dalam kerangka globalisasi, batas-batas wilayah akan cenderung menjadi semu dan mampu ditembus oleh efek global. Kondisi demikian menuntut adanya kesiapan dan persiapan SDM yang memadai.

Penyiapan SDM yang memadai berkaitan erat dengan proses pendidikan dan pelatihan. Karenanya penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, baik di lingkungan instansi Kementerian Perhubungan maupun



instansi-instansi lain yang terkait sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam menghadapi isu dan tantangan transportasi yang semakin kompleks di masa mendatang.

Dalam konteks penyiapan SDM di bidang transportasi, Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyiapan SDM transportasi. SDM yang disiapkan melalui pendidikan dan pelatihan meliputi transportasi moda darat, laut dan udara. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam berbagai jenis program diklat teknis, fungsional dan diklat pimpinan. Dalam kaitannya untuk mencapai tingkat yang optimal dalam pendidikan dan pelatihan transportasi, diperlukan arah kebijakan dan pengembangan strategis yang mampu memberikan panduan, arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan transportasi. Arah kebijakan dan pengembangan strategis perlu dituangkan dalam wujud Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Sejalan dengan upaya mewujudkan SDM Perhubungan yang handal dan siap menghadapi tantangan kemajuan pesat di bidang transportasi, Badan Pengembangan SDM Perhubungan harus menyiapkan SDM transportasi melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang meliputi transportasi moda darat, laut, udara dan perkeretaapian baik sebagai moda tunggal maupun multimoda serta kompetensi manajerial. Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan diselenggarakan melalui berbagai program diklat dan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan sehingga program-program yang dilaksanakan dapat berjalan efisien, optimal dan berhasil guna.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi program-program pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik program pembangunan yang ditangani langsung oleh Kementerian maupun program pembangunan yang dilakukan melalui melibatkan masyarakat, maupun Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional maupun internal dan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang terjadi, maka perlu dipandang perlu untuk melakukan penajaman penyempurnaan dan penyesuaian kembali sesuai dengan kondisi terakhir.



Renstra menjadi tolak ukur penting dari suatu mekanisme sistem akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dalam kurun waktu lima tahun. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tahunan harus tetap mengacu pada rencana strategis dan pada akhirnya setiap pelaksanaan pembangunan menjadi suatu perencanaan yang sistematis dan terukur. Penyusunan dokumen Renstra Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, serta berkelanjutan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kedudukan Renstra sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan menuju suatu sistem pembangunan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan. Dari kegiatan penyusunan renstra, berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi diharapkan dapat teratasi melalui pencermatan pada lingkungan strategis untuk selanjutnya dapat disusun ke dalam prioritas pembangunan.

Rencana Strategis Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang disusun dengan berpedoman Rencana Jangka Panjang Perhubungan 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024. Dokumen Renstra Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut 2020-2024 disusun sebagai panduan dan arahan bagi Unit Kerja dan Jajaran Birokrat di lingkup Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan SDM Transportasi Laut periode 2020-2024 secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/ sub-sektor terkait.

Memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka butuh kajian/ reviu Rencana Strategis di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, yang secara khusus juga perlu dilakukan pula kajian/ reviu terhadap Rencana Strategis pada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, guna mengevaluasi dan melakukan penajaman kembali terhadap hasil pencapaian target Rencana Strategis sekaligus menyempurnakan materi dan muatan Rencana Strategis yang terdapat dalam setiap program/ kegiatan Tahun 2020-2024 di UPT-UPT Diklat dibawah naungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, yang merupakan upaya

mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan melalui Visi dan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut revidi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
7. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan nomor: SK.260/BPSDMP-2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2020-2024
8. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan nomor: SK.59/BPSDMP-2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra 2020-2024 revidi tahun 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi dengan melakukan identifikasi perkembangan SDM menyesuaikan dengan realisasi yang telah dilaksanakan selama 2020-2023, sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan panduan serta arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masa lima tahun dari tahun 2020 s.d. tahun 2024 dengan menerapkan langkah-langkah sebagaimana ditetapkan dan atau diberikan petunjuk melalui peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional, yaitu:

1. Mengupayakan terwujudnya peserta diklat transportasi laut yang unggul, guna meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia transportasi laut,

dan meningkatkan jumlah lulusan diklat yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan standar nasional maupun standar internasional agar dapat memberikan pelayanan prima (quality services) yang didukung dengan fisik dan jasmani yang prima;

2. Mengupayakan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi unggul, disiplin, integritas yang kuat dan profesional serta didukung oleh fisik/jasmani yang prima; dan
3. Mengembangkan sistim informasi pengembangan SDM Perhubungan Laut sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat untuk mendorong dan mewujudkan sistim dan metode penyelenggaraan diklat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

D. Program dan Kegiatan

Program Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut yaitu pengembangan sumber daya manusia perhubungan khusus pada sektor transportasi laut. Sedangkan kegiatan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut adalah pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional sebagai berikut:

1. Pengembangan kualitas dan kapasitas SDM demi terwujudnya peserta diklat transportasi laut yang unggul, guna meningkatkan profesionalitas SDM transportasi laut, dan meningkatkan jumlah lulusan diklat yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan standar nasional maupun standar internasional agar dapat memberikan pelayanan prima (quality services) yang didukung dengan fisik dan jasmani yang prima. Lingkup strategi ini diawali dengan pelaksanaan proses penerimaan yang transparan, pengawasan atas kualitas selama pelaksanaan diklat, baik diklat pembentukan, penyegaran, maupun peningkatan, serta pembinaan berkesinambungan setelah memasuki dunia kerja, agar SDM transportasi laut yang dihasilkan sesuai kriteria yang ditetapkan, memiliki kompetensi baik hard skill maupun soft skill yang memadai, memiliki daya saing profesi di dunia internasional, serta tetap memiliki pengetahuan yang up to date dengan ketentuan nasional dan internasional.
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas kurikulum dan silabi silabus sebagai bagian dari standar proses yang perlu dipersiapkan dalam komponen standar penyelenggaraan diklat. Kurikulum dan Silabus yang

disusun adalah kurikulum yang berbasis kompetensi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi untuk mencapai tujuan lulusan diklat bidang transportasi laut dengan kompetensi unggul sesuai standar kompetensi. Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi, persyaratan peraturan terkait yang baru, serta tuntutan dunia kerja lulusan perlu selalu diselaraskan, agar apa yang diberikan kepada peserta diklat selama dalam proses pembelajaran tidak terdapat gap dengan dunia kerja yang akan menyerapnya. Untuk itu kegiatan review kurikulum secara berkala juga menjadi strategi penting yang perlu diterapkan oleh Pusbang SDM Perhubungan Laut.

3. Pengembangan kualitas dan kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Mengupayakan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi unggul, disiplin, integritas yang kuat dan profesional serta didukung oleh fisik/ jasmani yang prima, melalui cara sebagai berikut:
 - a. Melakukan perekrutan dengan metode pembibitan tenaga pendidik kepelautan baru melalui program pola pembibitan pada UPT Diklat Laut yang menyelenggarakan Program Diploma IV Pelayaran dan Diploma III Pelayaran, yang dimaksudkan untuk merekrut calon tenaga pendidik kepelautan sejak awal diklat pembentukan. Melalui metode ini diharapkan bahwa calon peserta diklat yang memiliki tingkat keunggulan baik dari sisi akademis dan aspek yang lain dapat direkrut untuk nantinya dipersiapkan sebagai calon pendidik. Program ini merupakan program jangka panjang untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik kepelautan di masa yang akan datang; dan
 - b. Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan selaras dengan perkembangan teknologi maritim ataupun ketentuan baru yang dipersyaratkan. Peningkatan kualitas juga akan diselenggarakan melalui pengiriman tenaga pendidik untuk mengikuti seminar ataupun workshop yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana diklat Pelayaran berbasis teknologi mutakhir dibidang informasi, komunikasi dan komputerisasi yang memenuhi standar nasional dan internasional sesuai tujuan pendidikan dan pelatihan dibidang perhubungan laut baik berbentuk simulator, laboratorium dan atau real equipment serta fasilitas lainnya; dan
5. Mengembangkan sistem informasi pengembangan SDM Perhubungan Laut sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

yang bermanfaat untuk mendorong dan mewujudkan sistem dan metode penyelenggaraan diklat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.



BAB II

CAPAIAN KINERJA 2015-2019

A. Target Kinerja 2015-2019

Kegiatan Diklat yang dilakukan Pusbang SDM Perhubungan Laut ialah Diklat Pengembangan SDM Pendidik dan tenaga Kependidikan. Target Kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan kinerja tahun 2015-2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
a	Terwujudnya Peserta Diklat SDM Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan rohani Yang Prima.	1	Jumlah peserta diklat SDM transportasi laut, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan;
b	Terwujudnya Lulusan Diklat SDM Transportasi Yang Bersertifikat.	2	Jumlah lulusan diklat SDM transportasi laut yang kompeten yang dihasilkan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;
c	Terwujudnya kurikulum dan silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan perkembangan IPTEK	3	Jumlah kurikulum silabi diklat SDM transportasi laut yang berbasis kompetensi;
d	Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, International recognition serta Public Private Partnership	4	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swata nasional atau asing dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, International recognition serta Public Private Partnership;
e	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan, Anggaran BPSDMP	5	Nilai AKIP Pusbang SDM Perhubungan laut;
		6	Tingkat penyerapan Anggaran Pusbang SDM Perhubungan Laut;
		7	Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP
f	Tersedianya Sarana dan Prasarana Diklat Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar diklat transportasi	8	Jumlah sarana diklat SDM transportasi laut yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir;
		9	Jumlah prasarana baru diklat Transportasi Laut yang dibangun.

B. Capaian Kinerja 2015-2019

Pengelolaan lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan dan Organisasi/ Lembaga pendidikan dan pelatihan aparatur transportasi laut membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan

nasional maupun internasional. Secara nasional persyaratan tersebut perlu diintegrasikan dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, SDM penyedia jasa transportasi laut, tenaga kerja di bidang transportasi laut dan pengelola lembaga pendidikan dan pelatihan transportasi laut harus mengembangkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan keahlian transportasi laut, diklat teknis transportasi laut, pendidikan sarjana sains terapan (S1 terapan), magister sains terapan (S2 terapan) atau doktor sains terapan (S3 terapan).

Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dalam 5 (lima) tahun antara lain:

1. Penyelesaian Pembangunan kampus Balai Diklat Pelayaran di Padang Pariaman, Sumatera Barat;
2. Penyelesaian Pembangunan kampus Balai Diklat Pelayaran di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;
3. Penyusunan Studi Kelayakan, Amdal, Master Plan dan DED Pembangunan kampus Balai Diklat Pelayaran di Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT);

Rincian target dan capaian kinerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut sepanjang tahun 2015-2019 disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.2. Target dan Capaian Kinerja 2015-2018

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2015		2016		2017		2018		2019		SATUAN
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
a	Terwujudnya Peserta Diklat SDM Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Rohani Yang Prima.	1 Jumlah peserta diklat SDM transportasi laut pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan	480	109	210	210	150	150	630	350	480	437	Orang
b	Terwujudnya Lulusan Diklat SDM Transportasi Yang Bersertifikat	2 Jumlah lulusan diklat SDM transportasi laut yang Kompeten yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/ kelulusan	480	109	210	210	150	150	630	350	480	437	Orang
c	Terwujudnya kurikulum dan silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan perkembangan IPTEK	3 Jumlah kurikulum, silabi diklat SDM transportasi laut yang berbasis kompetensi	12	2	13	21	6	3	22	15	6	6	Dokumen
d	Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga, International recognition serta public private partnership	4 Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta, nasional atau Internasional dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2015		2016		2017		2018		2019		SATUAN
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
		lembaga, International recognition serta public private partnership											
e	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran BPSDM	5 Nilai AKIP Pusbang PPSDMPL	85.50	90.46	85.50	77.74	85.50	87.00	85.50	89,50	85.50	89,50	Nilai
		6 Tingkat penyerapan Anggaran	90.00	86.84	97.70	97.09	95.55	76,62	92	86,56	93	98,40	(%)
		7 Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP	-	-	-	-	2	-	2	2,96	2	3,08	Level
j	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Diklat SDM Transportasi	8 Jumlah sarana Diklat SDM transportasi laut yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir	2	2	4	4	1	-	2	-	1	-	Unit
		9 Jumlah prasarana baru Diklat SDM Transportasi Laut yang dibangun	19,281	19,281	70,800	70,800	-	-	2 paket	-	2 paket	-	M2

BAB III

CAPAIAN KINERJA 2015-2019

A. Analisis Lingkungan

Dalam menentukan visi, misi, tujuan dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan memerlukan suatu analisis terhadap faktor pengaruh lingkungan strategis yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tugas pokok dan fungsi, dalam merencanakan komponen pengembangan SDM Perhubungan Laut, sarana, prasarana, kurikulum dan kelembagaan baik secara internal maupun eksternal.

Pendekatan teknik analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) digunakan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) suatu unit kerja, berkaitan dengan unsur-unsur sumber daya yang meliputi manusia (*man*), uang (*money*), metode (*method*), peralatan/perlengkapan (*material*), mesin (*machine*), pasar (*market*), teknologi (*technology*) dan informasi (*information*).

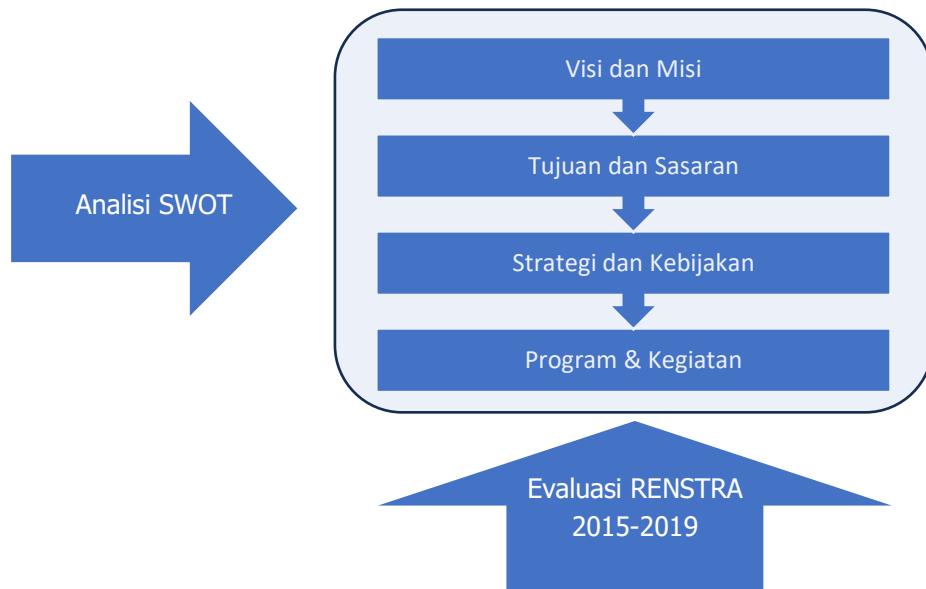
Menurut teknik penerapan analisis SWOT, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran suatu unit kerja secara umum dibagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal unit kerja dari kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan faktor eksternal unit kerja terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

B. Analisis SWOT

Pengaruh strategis internal akan diformulasikan dalam bentuk kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) sedangkan pengaruh strategis eksternal akan diformulasikan dalam bentuk peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

Sistematika penyusunan Renstra Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dijelaskan sebagai berikut:





Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA PPSDMPL 2015-2019

Untuk dapat merencanakan pengembangan SDM Perhubungan ini perlu dicermati berbagai permasalahan strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi penyelenggaraan Pengembangan SDM sehingga kerangka pikir penyusunan Renstra Pusat pengembangan SDM Perhubungan 2020-2024 dapat dikonkritkan dalam suatu metode yang dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Metode Penyusunan Renstra PPSDMPL 2019-2020

Dengan mempertimbangkan pengaruh perubahan lingkungan strategis tersebut maka di dalam evaluasi Renstra 2015-2019 dan penyusunan Rencana Strategis Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 akan dirumuskan Sasaran Strategis dalam mencapai Target Kinerja Tahunan hingga penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

1. Kekuatan (Strength)

- a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi laut;
- b. Perguruan Tinggi Pelayaran di lingkungan Kementerian Perhubungan moda transportasi laut meningkat dari 4 (empat) menjadi 10 (sepuluh) yaitu STIP Jakarta, PIP Semarang, PIP Makasar, Poltekpel Surabaya, Poltekpel Barombong, Poltekpel Banten, Poltekpel Malahayati, Poltekpel Sorong, Poltekpel Sulawesi Utara dan Poltekpel Sumatera Barat;
- c. Terdapat Lembaga Diklat Kepelautan yg dikelola Kementerian Lainnya, dan masyarakat berbentuk Universitas, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi dan SMK Pelayaran yang menjadi potensi Nasional produksi pelaut;
- d. Minat Masyarakat membuka Sekolah Pelayaran cukup Tinggi;
- e. Pemerataan Kesempatan Belajar masyarakat pada Sekolah Pelayaran meningkat dengan pembangunan dan peningkatan Poltekpel Sumatera Barat dan Poltekpel Sulawesi Utara;
- f. Jumlah Lulusan SMA dan SMK setiap tahun meningkat;
- g. Pembibitan SDM Aparatur bidang pelayaran berpotensi besar;
- h. Adanya kebijakan penyetaraan jenjang kompetensi pelaut melalui KKNI memberi dorong meningkatnya peminat Sekolah Pelayaran;
- i. Potensi Kepemimpinan Dosen/ Aparatur di UPT Diklat Laut BPSDM Perhubungan memadai;

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Perencanaan kebutuhan SDM Transportasi Bidang Pelayaran belum dilaksanakan dengan efektif;
 - b. Jumlah dan kapasitas SDM Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut masih sangat minim;
 - c. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaturan Lembaga Diklat Pelayaran belum optimal;
 - d. Evaluasi Kinerja Lembaga Diklat Pelayaran belum optimal;
- 

- e. Pengelolaan Standar isi dan proses Diklat belum optimal;
- f. Jumlah tenaga pendidik masih kurang;
- g. Jumlah, mutu dan pengelolaan sarana dan prasarana Lembaga Diklat Swasta masih rendah;
- h. Pengelolaan sumber daya organisasi, pembelajaran dan sistim mutu kepelautan belum optimal serta sumber daya pembiayaan belum optimal;
- i. Uji Kompetensi Kepelautan belum memenuhi standar kompetensi secara penuh;
- j. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana diklat memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi;
- k. Pelaksanaan penyuluhan SDM Transportasi bidang pelayaran belum tertata dengan baik;
- l. Pengembangan Sistim Informasi SDM Transportasi bidang pelayaran belum dikembangkan secara optimal; dan
- m. Kemampuan Lembaga Diklat dalam implementasi konvensi internasional dan peraturan nasional belum optimal.

3. Peluang (Opportunities)

- a. Minat masyarakat untuk bekerja sebagai pelaut dari waktu ke waktu meningkat;
- b. Minat Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Pelayaran masih tinggi;
- c. Pertumbuhan Lembaga Pelatihan Kepelautan bertambah;
- d. Pemerintah Pusat Mendukung pengembangan SDM Transportasi Bidang Pelayaran;
- e. Pengembangan pelabuhan terus bertambah;
- f. Pertumbuhan calon peserta Diklat Pelayaran mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun;
- g. Pertumbuhan arus barang melalui angkutan laut terus meningkat baik nasional maupun tingkat internasional; dan
- h. Pertumbuhan Industri galangan kapal dalam dan luar negeri meningkat setiap tahun;

4. Ancaman (threats)

- a. Perkembangan MASS (maritime autonomous surface ship) yang berpotensi mengurangi tenaga kerja yang bekerja di atas kapal;
- b. Kurangnya kompetensi para pelaut pada bidang teknologi informasi yang menjadi dasar kerja sistem otomatisasi di atas kapal; dan

- c. Kurangnya kemampuan bahasa asing bagi kru kapal dari Indonesia menyebabkan kalah bersaing dengan kru kapal dari negara lain.

C. PEMETAAN POSISI

Pemetaan posisi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dalam rangka pengembangan diklat kepelautan sesuai amanat UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, meliputi:

1. Kelembagaan;
2. Jalur, Jenis dan Jenjang Diklat;
3. Kurikulum dan Metode Diklat;
4. Sarana dan Prasarana Diklat;
5. Tenaga Pendidik dan Pelatih;
6. Peserta Diklat;
7. Standarisasi Diklat;
8. Pembiayaan Diklat;
9. Pengendalian dan Pengawasan Diklat;
10. Hak dan Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan Diklat.

Beberapa permasalahan yang timbul pada pendidikan dan pelatihan seperti pada diklat teknis yang dilaksanakan oleh UPT Laut berawal dari jumlah peserta diklat yang melebihi dari program awal yang telah ditetapkan, sehingga sarana dan prasarana diklat kurang memadai (bangunan kelas, dll). Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pembangunan beberapa gedung dan prasarana lainnya sehingga kendala tersebut bisa diatasi, terutama pada UPT-UPT yang banyak menyelenggarakan dan terfokus pada diklat teknis.

Sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan dunia industri maritim nasional dan internasional adalah semakin tingginya kebutuhan masyarakat. Perkembangan dunia industri maritim nasional dan internasional yang meningkat akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia.

Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa disuatu tempat tidak semuanya dapat dipenuhi sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang berupa barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain diperlukan alat transportasi. Maka dapat diartikan bahwa kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi laut berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk dunia. Kebutuhan pelaut dunia tiap tahun terus meningkat, demikian pula output (supply) pelaut yang tercipta juga meningkat, namun demikian belum mampu memenuhi kebutuhan pelaut secara penuh.

Secara umum beberapa permasalahan di lingkungan BPSDM Perhubungan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM Transportasi yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
 2. Belum selarasnya hasil diklat dengan kebutuhan pasar;
 3. Tidak tersedianya SDM yang mencukupi untuk tenaga pendidik (dosen, instruktur, dan widyaiswara) dan tenaga kependidikan baik kuantitas maupun kualitas;
 4. Sarana dan prasarana yang sebagian sudah *out of date* dan belum mencukupi untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta sistem pemeliharaan yang belum terintegrasi dengan pembelian;
 5. Sistem diklat yang belum terintegrasi melalui sistem informasi yang terkomputerisasi;
 6. Belum ada rencana induk pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi untuk merencanakan dan mensinergikan program pengembangan SDM transportasi dalam jangka Panjang; dan
 7. Manajemen penyelenggaraan pengembangan SDM masih perlu disempurnakan agar koordinasi kegiatan bisa berjalan dengan lebih baik, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang strategis.
- 

BAB IV

RENCANA STRATEGIS LIMA TAHUN

A. ISU STRATEGIS

1. Kebutuhan SDM Transportasi (Regulator, Operator, Industri) 2020– 2024

Arah kebutuhan SDM Transportasi Laut berdasarkan pada *job profile* SDM Perhubungan Laut yang terdiri dari 7 fungsi yaitu:

- a. Tenaga Negosiator dan Koordinator Kemaritiman (Fungsi 1- *Coordination and Negotiation*);

Sebagaimana diketahui, sebagai anggota IMO *council*, Indonesia memerlukan personel DELRI yang profesional. Selain itu seringkali para pelaut kita mengalami sengketa hubungan industrial yang sangat menyedihkan. Terkadang bahkan berurusan dengan keselamatan jiwa pelaut, seperti yang terjadi pada MV Sinar Kudus yang dibajak di perairan Somalia beberapa tahun yang lalu. Untuk keperluan seperti itu, diperlukan program diklat yang dapat mempersiapkan aparatur yang memiliki kemampuan bernegosiasi dengan berbagai pihak guna membela kepentingan/posisi Indonesia dan pelaut Indonesia.

- b. Tenaga shipping/ operator perusahaan angkutan laut (Fungsi 2- *Shipping*)

Sekarang banyak perusahaan yang mampu berdiri dengan tegak (dengan profit) biasanya memiliki manajemen berkewarganegaraan asing, atau bahkan perusahaan dengan modal asing yang didirikan di Indonesia dengan manajemen asing. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini, masih ada perusahaan angkutan laut yang hidup dari subsidi (BUMN), atau bila itu perusahaan nasional hidup dengan manajemen keluarga/tradisional yang kurang sehat, baik dari sisi profitabilitas maupun operasional keselamatan pelayaran.

Faktanya adalah tidak ada satupun perguruan tinggi di negeri ini yang menyediakan program yang dapat mencetak para manajer handal di bidang pelayaran. Kebanyakan tenaga manager di perusahaan pelayaran adalah mereka yang berangkat dari pengalaman, atau mereka yang mengenyam pendidikan di luar negeri.

Tentunya Pusbang SDM Perhubungan Laut juga memiliki kewajiban untuk menyusun dan mengembangkan program studi/diklat yang dapat menjembatani gap ini. Baik itu membangun UPT baru maupun mengoptimalkan UPT yang ada dengan memberikan mereka program yang baru dengan bobot *shipping management* yang lebih besar.

c. Tenaga Pelaut (Fungsi 3-Seafaring)

Tenaga Pelaut ini yang selama ini menjadi fokus terbesar oleh lembaga diklat dibawah Pusbang SDM Perhubungan Laut. Hingga saat ini ada 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepelautan, dan baru ada satu UPT yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perhubungan laut yaitu BP2TL Jakarta. Sungguhpun ada beberapa sekolah pelayaran yang dikelola oleh masyarakat swasta, namun pemenuhan standar diklat yang mereka laksanakan masih jauh dari harapan untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan.

Kenyataan menarik yang penting untuk disampaikan adalah bahwa diklat kepelautan di Indonesia saat ini baru menyentuh tingkat Kompetensi standar bagi pelaut sesuai jabatan tertentu untuk kapal dengan ukuran tertentu. Padahal dengan perkembangan IPTEK yang luar biasa pesatnya, jenis-jenis kapal dan teknologi yang dipergunakan dalam operasional kapal berkembang dengan sangat pesat.

Selain itu, kemajuan teknologi yang menghasilkan kapal dengan ukuran yang lebih besar dengan muatan tertentu belum sepenuhnya dimasukan dalam program diklat kita. Untuk itu Pusbang SDM Perhubungan Laut perlu memproyeksikan pertumbuhan pelaut regular dan juga pelaut yang memiliki keahlian yang spesifik untuk jenis kapal tertentu yang dapat bersaing di pelayaran global. Pelatihan untuk tenaga pelaut lepas pantai, pelaut-pelaut pada tingkat manajemen untuk kapal-kapal berukuran besar dan muatan yang khusus akan terus ditambah.

d. Tenaga Pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Fungsi 4 - *Sea Traffic and Shipment*)

Saat ini di dunia pelayaran menerapkan pelayanan pengaturan lalulintas pelayaran, *Vessel Traffic Service*. Di daerah-daerah dengan kepadatan lalulintas yang tinggi dibuat *Vessel Traffic Scheme*. Bahkan di selat Malaka sekarang diperlengkapi dengan *Maritime Electronic Highway* (MEH) dan Indonesia adalah salah satu *host*-nya.

Untuk merancang, mengoperasikan dan mengawasi kapal-kapal di alur pelayaran tersebut dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang mampu secara presisi mengawal pergerakan setiap kapal di area tersebut.

Dengan demikian, diperlukan juga pendidikan dan pelatihan bagi tenaga-tenaga yang dipersiapkan untuk menangani tugas tersebut.



e. Tenaga Kepelabuhanan dan Pengerukan (Fungsi 5 - *Port and Dredging*)

Aparatur yang menangani manajemen pelabuhan dari sisi kesyahbandaran saat ini adalah syahbandar/ otoritas pelabuhan, sedangkan dari sisi bisnis adalah operator pelabuhan. Untuk memenuhi SDM yang mampu mengisi kebutuhan ini, diperlukan banyak sekali kompetensi. Seperti kesyahbandaran (menyesuaikan kelas pelabuhan), inspektur maritim, ahli ukur kapal, dan lain-lain.

Sedangkan pemeliharaan pelabuhan dari sisi engineering dermaga dan pemeliharaan alur/ kedalaman kolam pelabuhan saat ini masih berharap pada para sarjana teknik sipil, yang pada tataran tertentu masih memerlukan tambahan kompetensi untuk mampu menangani pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan dan lingkungan sekitarnya.

Saat ini terdapat lebih dari 2.300 pelabuhan di seluruh wilayah NKRI dan akan terus bertambah seiring dengan pembangunan yang semakin merata, namun hal ini belum diimbangi dengan pertumbuhan tenaga yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan pelabuhan.

Program-program diklat baru seperti *port management*, *ship management*, dan kompetensi di bidang pemeliharaan lingkungan pelabuhan termasuk pengerukan (*dredging*), dan penanggulangan polusi pelabuhan, perlu untuk dibuka dan dikembangkan.

f. Tenaga Bagi Aparatur Navigasi (Fungsi 6 - *Navigation*)

Saat ini, masih banyak kekurangan tenaga pengawas dan penjaga suar di daerah terpencil, di pulau – pulau terluar dan di wilayah Alur Laut Indonesia. Namun, apabila sarana bantu navigasi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini tidak dirancang, dibangun, dioperasikan dan diawasi oleh tenaga- tenaga ahli di bidangnya, maka Indonesia dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota UNCLOS dalam menyediakan *Sea Lane*.

Banyak sarana bantu navigasi tidak sesuai antara spesifikasi teknis yang terdapat di dalam publikasi navigasi dengan yang ada di lapangan. Lampu suar dengan jarak tampak lebih lemah/dekat dari yang ada di peta, atau pelampung/buoy yang hanyut dan bergeser dari posisi yang telah diplot di peta tentu akan menyesatkan pelaut yang menavigasikan kapal dan membahayakan pelayaran.

SDM yang mumpuni dalam bidang ini masih sangat sedikit jumlahnya karena diklat yang terstruktur untuk ahli-ahli bidang ini belum dilembagakan secara optimal. Oleh karena itu Pusbang Laut merasa perlu untuk merancang program diklat semacam ini di BP2TL (Balai

Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut) yang akan disebar di wilayah Indonesia. Sehingga Aparatur Navigasi dapat ditingkatkan kompetensinya. Pengembangan/ penambahan organisasi BP2TL (Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut) merupakan rencana jangka menengah Pusbang Laut.

g. Tenaga Penjaga Laut dan Pantai (Fungsi 7-Sea and Coast Guard)

Semenjak UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran diterbitkan, ada amanat yang belum dapat dilaksanakan hingga saat ini, yaitu pembentukan *Sea and Coast Guard*. Untuk mempersiapkan pembentukan *Sea and Coast Guard* tersebut tentu tidak serta merta dibentuk tanpa mempersiapkan SDM yang kompeten.

Apabila dipandang perlu, Kementerian Perhubungan melalui BPSDMP dapat membangun lembaga khusus yang mendidik dan melatih personil *Sea and Coast Guard* dengan melibatkan tenaga-tenaga dari semua pihak yang selama ini menangani keamanan pantai dan pelabuhan untuk menjadi tenaga pengajar/ instruksinya. Hal ini sangat strategis mengingat *Sea and Coast Guard* butuh banyak tenaga.

2. Perkembangan Lingkungan Strategis: Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 adalah upaya transformasi untuk meningkatkan efisiensi pada setiap rantai nilai industri yang mengacu pada peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine-to-machine* dan *human* berkelanjutan pada industri. Tuntutan itu tak dapat dihindarkan, tetapi harus disambut dengan mempersiapkan diri dengan maksimal dan membutuhkan keterampilan baru sehingga penyiapan SDM dengan kompetensi sesuai dengan pendidikan. Langkah-langkah yang perlu diambil di antaranya dengan mengembangkan jurusan-jurusan baru yang *up to date*, bahwa pendidikan di Indonesia harus berubah menggunakan metode *problem based learning*.

Sistem pendidikan yang dapat menjawab tantangan tersebut adalah pendidikan lokasi yang dapat mencetak tenaga kerja dengan keterampilan khusus sesuai kebutuhan pada masing-masing industri.

Para pendidik dituntut menguasai keahlian, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global. Para pendidik dituntut menguasai keahlian, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global.

Keberhasilan Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0, turut ditentukan oleh kualitas dari pendidik seperti dosen, guru maupun tenaga pendidik lainnya. Para pendidik dituntut menguasai keahlian,

kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global. Setiap lembaga pendidikan di Tanah Air harus mempersiapkan orientasi dan literasi baru dalam bidang pendidikan, terutama yang sangat terkait erat dengan persiapan SDM dalam menghadapi revolusi industri ke - 4.0. Literasi lama yang mengandalkan baca, tulis dan matematika harus diperkuat dengan mempersiapkan literasi baru yaitu literasi data, teknologi dan sumber daya manusia. Literasi data adalah kemampuan untuk membaca, analisa dan menggunakan informasi dari data dalam dunia digital. Kemudian, literasi teknologi adalah kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan teknologi dalam dunia kerja. Sedangkan literasi sumber daya manusia yakni kemampuan berinteraksi dengan baik, tidak kaku, dan berkarakter.

3. Perkembangan Teknologi Informatika

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Penguasaan Data, Informasi, dan Teknologi dengan menstimulus dan memfasilitasi siswa serta masyarakat pendidikan untuk menguasai data dan informasi secara global, serta teknologi informasi yang dilaborasi dengan menciptakan ruang-ruang kreativitas dan ragam peluang yang memberikan keuntungan ekonomi yang sifatnya luas. Dalam hal ini, pemerintah harus dapat mengakomodir infrastruktur digital yang dibutuhkan siswa dan masyarakat pendidikan untuk meniscayakan penguasaan data, informasi, serta teknologi tersebut.

Bagi lembaga pendidikan, salah satu perkembangan teknologi dengan penerapan E-Learning sangat membantu pendidik maupun peserta didik dalam proses belajar mengajar. Materi pembelajaran dapat tercapai setiap semester untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Karena harus kita pahami, bahwa pertemuan atau tatap muka di ruang kelas (*face to face system*) sering tidak memadai waktunya untuk penyampaian suatu topik bahasan secara menyeluruh atau komprehensif. Dengan adanya bantuan teknologi seperti internet, maka materi yang kurang lengkap dapat dikirimkan dosen/ guru kepada mahasiswa/ siswa melalui surat elektronik (email) sehingga transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

4. Transformasi kelembagaan

Salah satu penunjang untuk mengembangkan SDM transportasi yaitu dengan Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dengandisertai

penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan tersebut mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) untuk seluruh UPT di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut.

Tabel 4.1. Kelembagaan UPT di Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut

NO	UPT	Perubahan Menjadi
1	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta	(tetap)
2	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	(tetap)
3	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	(tetap)
4	Politeknik Pelayaran Surabaya	(tetap)
5	Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	(tetap)
6	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong	Politeknik Pelayaran Barombong
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang	Politeknik Pelayaran Banten
8	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong	Politeknik Pelayaran Sorong
9	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh	Politeknik Pelayaran Malahayati
10	Balai Diklat Pelayaran Minahasa Selatan	Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
11	Balai Besar Pendidikan Pelatihan dan Penyegaran Ilmu Pelayaran Jakarta	(tetap)
12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta	(tetap)

5. Kebijakan Pemerintah

Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Perhubungan bagi lembaga pendidikan swasta melalui pola kerjasama untuk peningkatan kualitas pendidikan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu upaya untuk mendorong terjadinya peningkatan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dalam pengelolaan organisasi dapat diwujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan perhubungan, khususnya bidang transportasi diarahkan untuk lebih memperlancar arus barang dan jasa serta mobilitas manusia ke seluruh pelosok tanah air secara merata dan berkelanjutan. Kelancaran bidang transportasi berdampak langsung pada keseluruhan kegiatan pembangunan baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, perbatasan dan daerah terpencil. Kemajuan pembangunan bidang transportasi yang dicapai selama ini masih belum merata di seluruh wilayah, akibatnya upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional serta perwujudan konsepsi wawasan nusantara belum tercapai sepenuhnya. Kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan, terutama di wilayah Indonesia bagian barat telah menimbulkan ketimpangan antar daerah, ketimpangan sosial ekonomi dan ketimpangan antar golongan yang semakin tajam.

Wilayah Indonesia bagian timur, daerah-daerah pedesaan, perbatasan maupun daerah terpencil perlu mendapatkan prioritas dan dipercepat pembangunannya agar mampu mendorong pertumbuhan dan kelancaran arus perhubungan, transportasi dan komunikasi. Kebijakan pemerataan pembangunan tersebut diarahkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat, seperti:

- a. Kebutuhan masyarakat terhadap kelancaran transportasi barang/jasa dan mobilitas manusia semakin meningkat sehingga harus dipenuhi dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menjamin kegiatan transportasi berjalan secara cepat, teratur, aman, tepat waktu, nyaman dan dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat;
- b. Harapan masyarakat terhadap dibukanya daerah terisolir, terpencil dan belum maju untuk mengatasi kesenjangan dan kondisi sosial ekonomi antar daerah sehingga standar dan kualitas kehidupan manusia dapat ditingkatkan sedang kecemburuan sosial dapat diminimalisir;
- c. Ketidak merataan pertumbuhan bidang transportasi telah menimbulkan berbagai setimen kedaerahan yang mengarah pada gejala disintegrasi bangsa sehingga perlu perhatian yang serius adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketimpangan yang sudah berlangsung lama mengharuskan pemerintah untuk segera membuka daerah terpencil baik angkutan perintis, angkutan darat, laut maupun udara;
- d. Pembangunan bidang transportasi yang memadai dan merata, mampu memberikan pelayanan jasa angkutan yang memadai, dalam arti bahwa:

- 1) Transportasi mampu memberikan pelayanan secara cepat dan tepat baik ditinjau dari waktu maupun sasarannya;
- 2) Kebutuhan pemakai jasa angkutan dapat dilayani setiap saat dan secara merata di seluruh wilayah;
- 3) Terbuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di seluruh wilayah;
- 4) Terjadi kesetaraan dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan yang diperlukan masyarakat sehingga mampu meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah; dan
- 5) Kelancaran transportasi di seluruh wilayah mampu mendorong berbagai inisiatif dan inovasi untuk menciptakan sumber pendapatan sehingga secara akumulatif mampu meningkatkan kemakmuran bangsa.

Pembangunan bidang transportasi perlu didukung oleh pengembangan dan penerapan teknologi mutakhir yang berupa penerapan teknologi moderen, peningkatan kualitas pendidikan dan latihan, peningkatan taraf hidup rakyat dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang diperlukan masyarakat. Ketimpangan antar wilayah di satu sisi menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar dalam menikmati hasil pembangunan, di mana penduduk yang bertinggal di kota-kota besar cenderung dapat menikmati berbagai fasilitas transportasi yang ada di lingkungannya. Sedang di sisi lain, sebagian besar penduduk terutama yang bertinggal di daerah terpencil sama sekali belum terjamah bahkan masing masing dengan fasilitas transportasi. Akibatnya manfaat bidang transportasi hanya dinikmati oleh orang-orang yang berada di daerah pusat pertumbuhan saja.

Arah dan kebijakan pembangunan sektor transportasi pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, merangsang pembangunan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah, menyediakan armada transportasi yang murah, cepat, aman, tepat waktu dan sasaran, teratur dan efisien. Oleh karena itu kebijakan pembangunan bidang transportasi perlu dilakukan secara terpadu, berlanjut dan merata di seluruh wilayah. Mengingat wilayah Indonesia sangat luas dan permasalahan yang dihadapi sangat kompleks, maka kebijakan pembangunan bidang transportasi harus dilakukan dengan menetapkan skala prioritas, dalam arti bahwa:

- a. Hasil pembangunan bidang transportasi mampu menunjang pembangunan ekonomi secara menyeluruh, khususnya dalam distribusi barang/jasa dan mobilitas manusia;
- b. Hasil pembangunan bidang transportasi harus mampu meletakkan kerangka dan landasan yang kuat bagi terciptanya lapangan kerja, kesempatan berusaha, tingkat kemakmuran rakyat dan mampu menjamin keutuhan wilayah nasional.

Berbeda dengan kota-kota besar, pembangunan jalan raya di daerah terpencil, termasuk jaringan jalan menuju pemukiman, permasalahannya justru berpangkal dari manfaat jalan raya tersebut. Penduduk di daerah terpencil pada umumnya berjumlah relatif sedikit, alat transportasi yang digunakan masih sederhana dan jangkauan perdagangan relatif terbatas sehingga kontribusi jalan raya relatif kecil dibanding dengan jumlah investasi yang dikeluarkan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, langkah awal yang harus dilakukan adalah pembukaan jaringan jalan yang mampu menghubungkan berbagai tempat meskipun kondisi jalan masih berupa jalan tanah. Hal ini penting karena pengerasan atau pengaspalan jalan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah sekitar.

Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan, di dalamnya terdapat 17.559 pulau yang dihubungkan, didekatkan dan dipersatukan oleh laut. Dari jumlah pulau tersebut hanya terdapat lima pulau besar, yaitu pulau Irian barat, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Jawa. Pada pulau-pulau tertentu baik besar maupun kecil terdapat selat, sungai dan danau yang memungkinkan untuk digunakan sebagai sarana transportasi. Pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan perlu lebih ditingkatkan lagi terutama untuk menunjang jaringan transportasi darat, kereta api dan kapal ferry sehingga jangkauan dan mobilitas armada angkutan dapat semakin jauh, murah dan efisien. Dampak pembangunan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan akan sangat luas, terutama dalam distribusi fisik dan percepatan pembangunan daerah terpencil dan pedalaman.

Pembangunan perhubungan laut ditujukan untuk menyediakan pelayanan jasa angkutan yang lebih luas, tertib, teratur, aman, lancar, murah dan efisien, terutama untuk menjangkau daerah terpencil dan pedalaman. Transportasi laut, sampai sekarang masih menjadi andalan dalam pengangkutan domestik dan internasional. Pelayanan dalam negeri, diarahkan pada peranan dan fungsinya untuk mendukung pertumbuhan antar pulau dan perdagangan luar negeri. Kemampuan untuk melayani

kebutuhan transportasi nasional dan internasional perlu lebih ditingkatkan terutama kemampuan daya saingnya sehingga keberadaan transportasi laut mampu meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat.

B. VISI MISI ORGANISASI 2020-2024

Visi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut adalah terpenuhinya SDM Transportasi Laut yang kompeten, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam mewujudkan konektivitas nasional.

Misi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut.

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan Diklat Transportasi Laut yang unggul, berdaya saing, mandiri dan diakui dunia serta membawa perubahan yang meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan sumber daya manusia di bidang pelayaran sesuai dengan Standar Nasional dan Internasional; dan
3. Mengembangkan dan meningkatkan kemandirian, profesionalisme kelembagaan, sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan sebagai insan Diklat Perhubungan Laut sesuai perkembangan IPTEK.

C. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut

1. Mewujudkan ketersediaan SDM Transportasi Laut yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah;
2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi laut;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi Laut.

Sasaran Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut

1. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga;
 2. Meningkatnya kinerja dukungan pembinaan manajemen dan teknis pendidikan dan pelatihan;
 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai standar;
 4. Meningkatnya Pemenuhan Kurikulum silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai perkembangan IPTEK;
 5. Meningkatnya kualitas Perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- 

6. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Sarana & Prasarana dan sistem informasi yang memenuhi Standar Diklat Transportasi; dan
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran.

Kebijakan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut

Arah kebijakan SDM Transportasi Bidang Pelayaran adalah membentuk pola penyelenggaraan dan pengembangan SDM di bidang pelayaran dan multimoda transportasi bidang pelayaran untuk menciptakan SDM yang professional, kompeten, disiplin dan bertanggung jawab yang memenuhi standar Nasional maupun Internasional.

Penyelenggaraan dan pengembangan SDM di bidang pelayaran dan multimoda transportasi bidang pelayaran, meliputi:

1. SDM Perairan;
 2. SDM Kepelabuhanan;
 3. SDM Keamanan dan Keselamatan Pelayaran;
 4. SDM Perlindungan Lingkungan Maritim; dan
 5. SDM Multimoda Transportasi Bidang Pelayaran.
- 

Program dan Kegiatan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut tahun 2020-2024

KODE	URAIAN	Vol	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024	
			Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
SP.DL	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten											
IKP.DL	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten			85		85		85		85		85
SK.DL.1	Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar											
IKK.10	Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi			100		100		100		100		100
1975.ADD	Standarisasi Lembaga	91	21	3.831.140.000	17	3.330.151.000	16	3.422.996.000	19	3.703.233.000	18	3.568.319.000
ADD.004	Sertifikasi, Standarisasi Akreditasi dan Manajemen Mutu Diklat Transportasi Laut	55	10	1.565.565.000	11	1.565.779.000	9	1.383.598.000	14	2.037.335.000	11	2.025.729.000
051	Standar Pendidikan	30	5	817.111.000	7	1.000.805.000	6	904.127.000	7	1.157.886.000	5	994.945.000
A	Workshop Pedoman Diklat Keterampilan	3	1	174.923.000	1	112.120.000	1	122.781.000				
B	Workshop Penyusunan Prosedur Penerbitan Sertifikat COC, COE dan COP	1					1	125.791.000				
C	Pembinaan Standarisasi LSP 1 (satu)	5	1	190.872.000	1	22.000.000	1	145.984.000	1	58.633.000	1	213.086.000
D	Pengembangan LSP 2 (dua)	2			1	329.230.000	1	190.471.000				
E	Penyusunan Pedoman Pendidikan Kepelautan	1					1	181.878.000				
F	Seminar Implementasi Diklat Keterampilan	1			1	149.269.000						
G	Workshop Evaluasi Kerjasama Penyelenggaraan Diklat Keterampilan	2	1	161.788.000	1	140.250.000						
H	Reviu Pedoman Pendidikan	1			1	120.992.000						
I	Penyusunan Pedoman Bimbingan Teknis Diklat Keahlian Pelaut	1							1	102.336.000		
J	Workshop Penyusunan Dokumen Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	1							1	186.131.000		

KODE	URAIAN	Vol	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024	
			Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
K	Sosialisasi Pedoman Pendidikan Kepelautan Berupa Pedoman Penggunaan SIMPEL, LMS dan CBT	1							1	262.730.000		
L	Penyusunan Pedoman dan Kurikulum Diklat Keterampilan Pelayaran	1							1	124.419.000		
M	Sosialisasi Kebijakan Terkait Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan	1							1	263.058.000		
N	FGD Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Optimalisasi Asosiasi Prodi Bidang Pelayaran	1									1	214.476.000
O	Workshop pedoman operasional Baku (POB) Pertukaran taruna	1									1	176.143.000
P	Reviu Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayaran	1									1	195.148.000
Q	Workshop Pembinaan Kegiatan Penelitian Dosen	3			1	126.944.000	1	137.222.000	1	160.579.000		
R	Workshop Penyusunan Standar Mutu Pendidikan Kepelautan	1									1	196.092.000
S	Seminar Implementasi Diklat Keterampilan	1	1	144.930.000								
T	Workshop Penyusunan Pedoman Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Diklat Keterampilan Kepelautan	1	1	144.598.000								
052	Penyusunan Standar Penelitian	1	1	170.651.000	-	-	-	-	-	-	-	-
A	Workshop Pembinaan Kegiatan Penelitian Dosen	1	1	170.651.000								
053	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	7	2	353.971.000	2	376.580.000	1	132.512.000	1	220.559.000	1	153.118.000
A	Workshop Penyusunan Pedoman Dosen Magang Dalam Rangka Pengabdian Kepada Masyarakat	5	1	157.118.000	1	135.540.000	1	132.512.000	1	220.559.000	1	153.118.000
B	Sosialisasi Pelaksanaan DPM	1			1	241.040.000						
C	Sosialisasi Kurikulum dan Zonasi Pelaksanaan DPM	1	1	196.853.000								
054	Pendampingan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan	17	2	223.832.000	2	188.394.000	2	346.959.000	6	658.890.000	5	877.666.000
A	Pelaksanaan Rekomendasi Diklat Keterampilan Pelayaran	2			1	94.197.000	1	196.346.000				
B	Pendampingan Audit Surveillance Diklat Keahlian Pelaut	5	1	128.014.000	1	94.197.000	1	150.613.000	1	171.600.000	1	257.474.000
C	Pelaksanaan Akreditasi Diklat Keterampilan Pelayaran berbasis Standarisasi Kompetensi Kerja	1							1	84.507.000		
D	Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi dan Standarisasi Diklat Keterampilan Pelayaran	1							1	105.112.000		

KODE	URAIAN	Vol	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024	
			Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
E	Pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Diklat Keterampilan Pelayaran berbasis STCW 2010	2							1	56.846.000	1	197.866.000
F	Pembinaan Standarisasi dan Pengembangan Diklat Keterampilan Pelayaran	2							1	98.810.000	1	135.551.000
G	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Diklat Keahlian Pelaut	2							1	142.015.000	1	146.631.000
H	Pendampingan Audit Surveillance Diklat Keterampilan Pelaut	2	1	95.818.000							1	140.144.000
ADD.005	Standarisasi Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan Transportasi Laut	36	11	2.265.575.000	6	1.764.372.000	7	2.039.398.000	5	1.665.898.000	7	1.542.590.000
051	Pemantauan dan Pelaporan Diklat Perhubungan	22	5	1.439.116.000	3	1.235.872.000	4	1.132.806.000	4	1.476.738.000	6	1.420.273.000
A	Pelaksanaan Standarisasi dan Pengembangan Diklat Keterampilan Pelayaran	2			1	246.328.000	1	305.403.000				
B	Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan Kepelautan	2			1	743.111.000	1	451.719.000				
C	Workshop Penyusunan Instrument Monitoring Berdasarkan QSS dan Audit	1					1	161.195.000				
D	Pemantauan dan Evaluasi Diklat Keterampilan dan DPM Matra Laut	4	1	408.048.000			1	214.489.000	1	328.798.000	1	118.763.000
E	Pembinaan dan Monitoring Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM)	3	1	146.420.000	1	246.433.000			1	568.250.000		
F	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Diklat Keterampilan Pelaut	2							1	303.194.000	1	196.789.000
G	Konsinyering Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Diklat Keterampilan Pelaut	2							1	276.496.000	1	253.291.000
H	Monitoring, Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan	1									1	427.432.000
I	Konsinyering Hasil Monitoring, Pemantauan dan Evaluasi Diklat Keahlian Pelaut	2	1	617.875.000							1	187.028.000
J	Workshop Pemutakhiran Data Diklat	1									1	236.970.000
K	Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Keterampilan Kepelautan (Visitasi)	1	1	185.962.000								
L	Piket Work From Office Dalam Rangka Pemantauan Diklat	1	1	80.811.000								
052	FGD Pemantauan dan Pelaporan Diklat Perhubungan	9	5	634.212.000	2	277.544.000	2	644.531.000	-	-	-	-

KODE	URAIAN	Vol	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024	
			Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
A	Workshop Evaluasi Pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM)	1					1	197.380.000				
B	Monitoring Dan Evaluasi Laporan Kinerja Kegiatan Matra Laut	1					1	447.151.000				
C	Focus Group Discussion Pembinaan Pola Asuh Taruna/taruni	1			1	142.910.000						
D	Kerjasama Prodi Diklat Transportasi Laut	1			1	134.634.000						
E	Focus Group Discussion Pembinaan Pola Asuh Taruna/taruni	1	1	159.221.000								
F	Kerjasama Prodi Diklat Transportasi Laut di NTT	1	1	161.249.000								
G	FGD Persiapan Kerjasama Kementerian Perhubungan dengan Pondok Pesantren/ Organisasi Massa	1	1	61.218.000								
H	FGD Persiapan Penandatanganan PKS Antara UPT di Lingkungan PPSDMPL dengan Perguruan Tinggi di Lingkungan Diiktilitbang Muhammadiyah	1	1	60.966.000								
I	Forum Grup Discussion (FGD) Perumusan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kapal Latih	1	1	191.558.000								
054	Pendampingan Pelaksanaan Sipencatar	5	1	192.247.000	1	250.956.000	1	262.061.000	1	189.160.000	1	122.317.000
A	Pendampingan Pelaksanaan SIPENCATAR	5	1	192.247.000	1	250.956.000	1	262.061.000	1	189.160.000	1	122.317.000
SK.DL.2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.											
IKK.11	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi			87		88		89		89		89
IKK.12	Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi			90		90		90		90		90
1975.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	165	127	2.000.000.000	7	310.515.000	3	1.785.607.000	20	555.905.000	8	88.000.000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	165	127	2.000.000.000	7	310.515.000	3	1.785.607.000	20	555.905.000	8	88.000.000
051	Kendaraan Bermotor	1	-	-	1	93.340.000	-	-	-	-	-	-
A	Pengadaan kendaraan bermotor R-2	1			1	93.340.000						
052	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	129	93	1.043.082.000	5	148.975.000	3	1.785.607.000	20	555.905.000	8	88.000.000
A	APLIKASI CBT	1					1	595.101.000				
B	Distance Learning	1					1	103.507.000				

KODE	URAIAN	Vol	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024	
			Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
C	Aplikasi Learning Management System (LMS) Pengembangan Aplikasi Pelaporan Lembaga Diklat (SIMPEL)	2	1	240.000.000			1	1.086.999.000				
D	Komputer	19	16	240.000.000	1	68.450.000			2	39.000.000		
E	Laptop	25	16	187.000.000	1	30.000.000			4	73.000.000	4	72.000.000
F	Scanner	11	8	42.750.000	1	33.330.000			2	31.400.000		
G	Printer	11			1	5.056.000			6	56.502.000	4	16.000.000
H	Access Point dan Controller	1			1	12.139.000						
I	Switch Manageble	1							1	323.909.000		
J	Web Camera Zoom Camera	2							2	25.224.000		
K	Wifi Device (Access Point)	3							3	6.870.000		
L	Firewall	1	1	189.100.000								
M	Kamera	1	1	15.900.000								
N	Handy Talky	2	2	11.960.000								
O	Eksternal Hardisk	3	3	9.423.000								
P	Webcam	2	2	9.094.000								
Q	UPS	40	40	94.000.000								
R	Laser Pointer	2	2	1.209.000								
S	Modem	1	1	2.646.000								
053	Peralatan Fasilitas Perkantoran	35	34	956.918.000	1	68.200.000	-	-	-	-	-	-
A	Pendeteksi COVID-19	1			1	68.200.000						
B	Mesin Fax	1	1	5.518.000								
C	TOA Wireless Microphone	1	1	7.700.000								
D	Kursi Kerja	10	10	26.660.000								
E	Meja Partisi	1	1	425.540.000								
F	Lemari Arsip	4	4	8.558.000								
H	Projector	3	3	51.720.000								
I	IPCamera/CCTV	1	1	196.185.000								
J	Buku-buku IMO	1	1	150.000.000								

KODE	URAIAN	Vol	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024	
			Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
K	Pengukur Suhu	1	1	2.015.000								
L	Alat Semprot Disinfectan	1	1	1.875.000								
M	Bilik Disinfectan	1	1	5.500.000								
N	Pendingin Ruangan Server	1	1	13.265.000								
O	Speaker Portable	2	2	5.412.000								
P	Lampu UV	5	5	22.500.000								
Q	Pengukur Suhu Otomatis	1	1	34.470.000								
1975.AEC	Kerja sama	16	10	247.400.000	1	347.700.000	1	207.914.000	2	424.414.000	8	245.469.170.098
AEC.002	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut	16	10	247.400.000	1	347.700.000	1	207.914.000	2	424.414.000	8	245.469.170.098
051	Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait	6	3	-	0	-	1	207.914.000	2	424.414.000	-	-
A	Mengikuti Sidang Council, Assembly 33rd Session	2	1						1	276.271.000		
B	Workshop Evaluasi Kerjasama Penyelenggaraan Diklat Keterampilan	2	1						1	148.143.000		
C	Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Kegiatan Bidang Pendidikan	2	1				1	207.914.000				
052	Kerjasama Luar Negeri	10	7	247.400.000	1	347.700.000	-	-	-	-	8	245.469.170.098
A	Penyusunan Laporan Sidang IMO	3	1		1	347.700.000					1	316.616.000
B	Mengikuti Sidang Sub Committee on Human Element, Training and Watchkeeping (HTW)	2	1								1	238.046.000
C	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Sidang Sub Committee on Human Element, Training and Watchkeeping (HTW) - 7th session	1	1	71.700.000							2	69.914.508.098
D	Evaluasi dan Pelaporan Hasil sidang Maritime Safety Committee (MSC) - 102th session,	1	1	43.850.000							1	43.750.000.000
E	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Sidang Council - 122th session	1	1	43.850.000							1	43.750.000.000
G	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) - 75 Session	1	1	43.850.000							1	43.750.000.000
H	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Sidang Sub Committee on Implementation of IMO Instrument (III) -7 th Session	1	1	44.150.000							1	43.750.000.000
1975.BMA	Data dan Informasi Publik	9	6	989.659.000	1	223.322.000	1	983.101.000	1	1.516.293.000	1	1.019.583.000

[illegible]

KODE	URAIAN	Vol	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024	
			Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
IKK.22	Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi			100		100		100		100		100
1975.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	41	6	1.817.373.000	6	2.293.191.000	9	3.137.331.000	8	1.436.997.000	12	2.161.393.000
AFA.007	SKKNI Transportasi Laut	12	1	655.982.000	2	1.290.060.000	2	1.230.032.000	5	911.698.000	2	151.472.000
051	Penyusunan SKKNI Transportasi Laut	12	1	655.982.000	2	1.290.060.000	2	1.230.032.000	5	911.698.000	2	151.472.000
A	Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	2	1	655.982.000			1	508.373.000				
B	Penyusunan Peta Okupasi Sub Sektor Transportasi Laut	1					1	721.659.000				
C	Standarisasi Kompetensi Assessor Kerja Nasional Indonesia	1			1	312.400.000						
D	Pelaksanaan Penyusunan RSKKNI Sub Sektor Transportasi Laut	2			1	977.660.000			1	354.764.000		
E	Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK)	1							1	293.164.000		
F	Penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK) Sub SektorTransportasi Laut	2							1	125.051.000	1	75.466.000
G	Sosialisasi Bersama Stakeholder Terkait Standarisasi Pelatihan Pelayaran Berbasis SKKNI dan SKKK	2							1	72.159.000	1	76.006.000
H	Sosialisasi Bersama Stake Holder Terkait Skema dan Materi Uji Kompetensi Sub Sektor Perhubungan Laut	1							1	66.560.000		
AFA.008	Grand Desain SDM Transportasi Laut	1	-	-	1	555.851.000	-	-	-	-	-	-
051	Penyusunan Grand Desain SDM Transportasi Laut	1	-	-	1	555.851.000	-	-	-	-	-	-
A	Penyusunan Grand Desain SDM Transportasi Laut	1			1	555.851.000						
AFA.014	Kurikulum dan Silabi Berbasis Kompetensi Transportasi Laut	21	3	647.699.000	3	447.280.000	5	1.400.071.000	2	309.277.000	8	1.383.274.000
051	Kurikulum dan Silabus Diklat	10	-	-	0	-	3	1.139.520.000	2	309.277.000	5	745.280.000
A	Penyusunan Kurikulum On Sea Services Post Sea Services	1					1	738.975.000				
B	Workshop Penyusunan Pedoman Pertukaran Taruna sesuai Kurikulum MBKM	1					1	216.362.000				
C	Workshop Pengembangan Kurikulum S2	1					1	184.183.000				
D	Penyusunan Kurikulum dan Silabus IMO Model Course 1.30 (Onboard Assessment)	1							1	159.897.000		
E	Reviu Kurikulum dan Silabus Diklat Pembentukan Kompetensi Kepelautan	1							1	149.380.000		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	URAIAN	Vol	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024	
			Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
J	Sosialisasi Sistem Administrasi Perkantoran Terkait Sistem Tata Naskah Kementerian Perhubungan	1									1	125.803.000
K	Pengelolaan Dan Penyusutan Dokumen Tata Naskah Tahun 2024	1									1	11.090.000
L	Studi Banding Kearsipan	1									1	3.440.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	26	5	9.872.515.000	5	10.156.968.000	6	10.301.078.000	5	10.855.267.000	5	13.325.489.000
001	Gaji dan Tunjangan	5	1	7.011.396.000	1	7.072.043.000	1	7.431.826.000	1	6.971.714.000	1	9.569.863.000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5	1	7.011.396.000	1	7.072.043.000	1	7.431.826.000	1	6.971.714.000	1	9.569.863.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	21	4	2.861.119.000	4	3.084.925.000	5	2.869.252.000	4	3.883.553.000	4	3.755.626.000
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	5	1	1.945.469.000	1	1.989.461.000	1	2.087.982.000	1	2.415.421.000	1	2.580.532.000
B	Langganan Daya dan Jasa	5	1	222.600.000	1	255.036.000	1	2.086.000	1	1.140.000	1	43.800.000
C	Pemeliharaan Kantor	5	1	395.340.000	1	523.488.000	1	405.876.000	1	759.234.000	1	1.039.246.000
D	Pembayaran Terkait Operasional Kantor	5	1	297.710.000	1	316.940.000	1	200.400.000	1	707.758.000	1	92.048.000
E	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pramu Bakti/Perawat/Dokter/Satpam dan Tenaga Teknis Lainnya	1					1	172.908.000				
4627.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3	-	-	1	1.811.913.000	2	102.589.000	-	-	-	-
EBB.951	Layanan Sarana Internal	3	-	-	1	1.811.913.000	2	102.589.000	-	-	-	-
052	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3	-	-	1	1.811.913.000	2	102.589.000	-	-	-	-
A	Akses Point Wireles	1					1	5.741.000				
B	Pengembangan Aplikasi Pelaporan Lembaga Diklat (SIMPEL)	1					1	96.848.000				
C	Peningkatan Kualitas Ruangan Kantor (Smart Office)	1			1	1.811.913.000						
4627.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	109	26	3.192.045.000	22	1.972.024.000	19	2.254.301.000	18	2.723.165.000	24	3.559.472.000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	45	9	1.061.764.000	9	725.919.000	9	1.323.111.000	9	1.594.695.000	9	1.906.340.000
051	Layanan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	30	6	460.853.000	6	234.961.000	6	539.497.000	6	986.644.000	6	1.441.538.000
A	Review Renstra	5	1	164.152.000	1	34.040.000	1	41.674.000	1	17.327.000	1	528.304.000
B	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	5	1	105.050.000	1	7.470.000	1	31.338.000	1	30.334.000	1	34.214.000
C	Rencana Kerja Anggaran Pagu Kebutuhan	5	1	155.291.000	1	155.428.000	1	225.242.000	1	343.859.000	1	220.546.000

KODE	URAIAN	Vol	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024	
			Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
D	Rencana Kerja Anggaran Pagu Indikatif	5	1	10.740.000	1	15.010.000	1	192.168.000	1	199.754.000	1	166.544.000
E	Rencana Kerja Anggaran Pagu Anggaran	5	1	7.350.000	1	11.563.000	1	16.699.000	1	165.734.000	1	288.178.000
F	Rencana Kerja Anggaran Pagu Alokasi	5	1	18.270.000	1	11.450.000	1	32.376.000	1	229.636.000	1	203.752.000
52	Layanan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	15	3	600.911.000	3	490.958.000	3	783.614.000	3	608.051.000	3	464.802.000
A	Kegiatan Penyusunan SPIP	4	1	162.101.000	1	104.586.000	1	134.538.000	1	157.199.000		
B	Monitoring dan Evaluasi SPIP	5	1	137.666.000	1	152.814.000	1	213.276.000	1	12.809.000	1	43.732.000
C	Standar Manajemen Mutu ISO	5	1	301.144.000	1	233.558.000	1	435.800.000	1	438.043.000	1	280.600.000
D	Kegiatan Sosialisasi/Bimtek MR (Management Resiko)	1									1	140.470.000
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	29	7	936.337.000	5	557.546.000	5	456.992.000	5	622.134.000	7	793.074.000
051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	29	7	936.337.000	5	557.546.000	5	456.992.000	5	622.134.000	7	793.074.000
A	Laporan Tahunan (LAPTAH)	4	1	124.355.000	1	128.681.000	1	112.879.000	1	166.340.000		
B	Laporan Kinerja (LAKIP)	4	1	140.536.000	1	119.647.000	1	90.991.000	1	145.670.000		
C	PP 39/Monev	4	1	132.510.000		12.450.000	1	46.269.000	1	15.706.000	1	174.148.000
D	Bimbingan Teknis Aplikasi Monitoring Capaian Kinerja E-Performance	1					1	178.301.000				
E	Penyusunan Statistik	4	1	235.705.000	1	91.450.000			1	168.793.000	1	55.108.000
F	Kegiatan Monitoring, Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan	3	1	123.470.000	1	192.558.000				117.927.000	1	221.954.000
G	Penetapan Kinerja (PK)	5	1	11.650.000	1	12.760.000	1	28.552.000	1	7.698.000	1	60.180.000
H	Konsinyering Finalisasi Laporan Kegiatan Prioritas Nasional Periode 2014 s.d. 2024	1									1	123.371.000
I	Konsinyering Reviu Capaian Kinerja Triwulan I dan Penyusunan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	1									1	116.669.000
J	Konsinyering Pengisian Laporan SMART DJA	1									1	41.644.000
K	Bimbingan Teknis Analisa dan Evaluasi Manajemen Pelaksanaan Kegiatan	1	1	168.111.000								
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	35	10	1.193.944.000	8	688.559.000	5	474.198.000	4	506.336.000	8	860.058.000
051	Layanan Keuangan dan Perbendaharaan	35	10	1.193.944.000	8	688.559.000	5	474.198.000	4	506.336.000	8	860.058.000
A	Sistem Akuntansi Intansi (SAI)	3	1	131.689.000			1	99.335.000			1	149.771.000
B	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	3	1	111.742.000			1	3.146.000			1	4.480.000

KODE	URAIAN	Vol	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024	
			Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
C	Pengelolaan BMN	5	1	60.824.000	1	82.196.000	1	63.139.000	1	45.838.000	1	157.923.000
D	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	4	1	101.696.000	1	125.846.000	1	214.268.000	1	122.076.000		
E	Penguatan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Pemerintah Pada UPT Matra Laut	1					1	94.310.000				
F	Rencana Strategi Bisnis (RSB)	3	1	131.300.000	1	150.000					1	9.786.000
G	Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)	3	1	148.035.000	1	48.670.000					1	156.206.000
H	Monitoring dan Evaluasi PNPB/BLU	1			1	98.202.000						
I	Penatausahaan Piutang dan Persediaan	2	1	144.397.000	1	44.367.000						
J	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Remunerasi BLU	1			1	73.935.000						
K	Evaluasi Kemanfaatan Aset Tak Berwujud di Lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Serta Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Remunerasi UPT Matra Laut	1							1	214.962.000		
L	Penyusunan SIMAK BMN	2			1	215.193.000			1	123.460.000		
M	Perencanaan serta Pengelolaan Kas dan Modernisasi untuk Peningkatan Layanan dan Tata Kelola BLU	1									1	131.913.000
N	Pengelolaan dan Pembinaan BLU Berupa Penyusunan Tarif Kolektif Matra Laut	1									1	209.229.000
O	Certified Government Accounting Expert	1									1	40.750.000
P	Pengelolaan PNPB/BLU	1	1	85.050.000								
Q	Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	1	1	97.253.000								
R	Penyusunan Dokumen Remunerasi	1	1	181.958.000								
SK.WA.4628	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSPDMP											
IKK.25	Indeks SPBE BPSPDMP			100		100		100		100		100

D. INDIKATOR KINERJA

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
2020-2024

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	75	79	79.5	80	80.5
b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	2	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%	85	85	85	85	85
c	SK.DL.01.02.Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar	3	IKK 10.Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
d	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	4	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%	70	80	87	88	89
		5	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%	90	90	90	90	90
e	SK .WA.03.02 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	6	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
		7	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai	91	91.5	91.5	91.7	92.3
		8	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai	75	76	77	78	79
		9	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	80.2	84.2	86.2	88.2	90
		10	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	78	80	82	84	85
		11	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	85	85	90	90	90
		12	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai	70	71	72	73	74
f		13		%	100	100	100	100	100

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
	SK.DL.01.04. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum SDM Transportasi		IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi						
		14	IKK 24. Indeks tata Kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0,8	0,9	0,92	0,96	1
h	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	15	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%	90	90	90	90	100

E. KEGIATAN UTAMA RENCANA STRATEGI TAHUN 2020-2024

1. Pengembangan SDM

- Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/ Swasta/ Lembaga terkait berupa kegiatan FGD Pelaksanaan Diklat Keterampilan dengan Instansi Luar Negeri;
- Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri berupa kegiatan Mengikuti sidang IMO dengan tujuan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dapat memutakhirkan pengetahuan dan mengetahui hal-hal baru yang sangat penting dan fundamental dari hasil sidang IMO terkait perkembangan mekanisme kerja sama peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
- Pendampingan Pelaksanaan Sipencatar Pada UPT PPSDMPL. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dan Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan melakukan roadshow ke daerah-daerah dan monitoring pengawasan pelaksanaan tes ujian akademik dalam penerimaan calon taruna;
- Pembinaan Penyelenggara Diklat diklat kepelautan agar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara diklat memenuhi ketentuan nasional dan internasional. Indonesia sebagai salah satu negara anggota *International Maritime Organization* (IMO) memiliki kewajiban untuk menjaga pelaksanaan diklat dan penilaiannya sesuai dengan ketentuan STCW 1978 dan amandemennya. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan dilakukan antara lain dengan sosialisasi peraturan, pengembangan dan peningkatan pengelolaan diklat kepelautan maupun kerjasama diklat kepelautan. Sampai dengan saat ini sudah 54 (lima puluh empat) institusi penyelenggara diklat kepelautan yang telah mendapatkan approval

dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang harus dijaga mutu dan kualitasnya sehingga senantiasa sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional; dan

- e. Melaksanakan sertifikasi, standarisasi, akreditasi dan manajemen mutu diklat, pendampingan *audit surveillance* diklat. Penyelenggara diklat kepelautan yang mendapatkan sertifikat approval dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) setiap tahunnya wajib untuk dilaksanakan audit surveillance (audit tahunan). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim dari DJPL dan Tim dari Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut. Anggaran perjalanan dinas dianggarkan dari DIPA Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Teknis Approval untuk kegiatan *audit surveillance*. Sampai dengan saat ini terdapat 54 (lima puluh empat) penyelenggara pendidikan dan pelatihan (kompetensi keahlian pelaut).

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya penataan dan pengelolaan dalam penguasaan teknologi sehingga terjadi peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai dukungan pelaksanaan kegiatan Pengembangan SDM Transportasi Laut secara akuntabel, tertib, teratur, efektif, dan efisien.

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana antara lain:

- a. Pengadaan Kendaraan Bermotor;
- b. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- c. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; dan
- d. Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan.

3. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

- a. Peningkatan kapasitas berbahasa asing (inggris) untuk tenaga pendidik dan kependidikan
- b. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan capacity building Dosen, dengan mendatangkan tenaga pengajar dari luar negeri untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan sekaligus menggali pokok bahasan-bahasan terkini perkembangan teknologi dunia pelayaran.
- c. Kegiatan seminar nasional dilaksanakan sebagai wadah seminar penelitian dosen ataupun pegawai di lingkungan Kementerian

Perhubungan terkait SDM Pelayaran sekaligus mengundang narasumber-narasumber yang kompeten dibidangnya .

4. Status Kelembagaan dan Pengembangan Prodi

- a. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut mengajukan usulan penyelarasan Program Studi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) antara lain:

Tabel 4.4. Penyelarasan Program Studi Sekolah Tinggi/ Politeknik
Matra Laut

NO	NAMA UPT DIKLAT	JENIS PROGRAM	NAMA SESUAI KEPUTUSAN MENRISTEKDIKTI/ MENDIKBUD	NAMA PROGRAM STUDI USULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta	D.IV	NAUTIKA	Teknologi Rekayasa Operasi Kapal
		D.IV	TEHNIKA	Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal
		D.IV	Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	Logistik Maritim dan Manajemen Pelabuhan
2	Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang	D.IV	NAUTIKA	Teknologi Rekayasa Operasi Kapal
		D.IV	TEHNIKA	Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal
		D.IV	Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	Logistik Maritim dan Manajemen Pelabuhan
3	Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makasar	D.IV	NAUTIKA	Teknologi Rekayasa Operasi Kapal
		D.IV	TEHNIKA	Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal
		D.IV	Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	Logistik Maritime dan Manajemen Pelabuhan
4	Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya	D.III	NAUTIKA	Study Nautika
		D.III	TEHNIKA	Permesinan Kapal
		D.III	ETO	Sistem Kelistrikan Kapal
		D.IV	Teknologi Rekayasa Operasi Kapal	Teknologi Rekayasa Operasi Kapal
		D.IV	Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal	Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal
		D.IV	Logistik Maritime dan Manajemen Pelabuhan	Logistik Maritime dan Manajemen Pelabuhan
		D.IV	Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal	Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal
5	Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat	D.III	Study Nautika	Study Nautika
		D.III	Tehnologi Nautika	Permesinan Kapal

NO	NAMA UPT DIKLAT	JENIS PROGRAM	NAMA SESUAI KEPUTUSAN MENRISTEKDIKTI/ MENDIKBUD	NAMA PROGRAM STUDI USULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		D.IV	Transportasi laut	Transportasi laut
6	Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong	D.III	Studi Nautika	Studi Nautika
		D.III	Studi Permesinan Kapal	Studi Permesinan Kapal
		D.III	Manajemen Transportasi Laut	Manajemen Transportasi Laut
7	Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati	D.III	Studi Nautika	Studi Nautika
		D.III	Studi Permesinan Kapal	Studi Permesinan Kapal
		D.III	Sistem Kelistrikan Kapal	Sistem Kelistrikan Kapal
8	Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong	D.III	Studi Nautika	Studi Nautika
		D.III	Studi Permesinan Kapal	Studi Permesinan Kapal
		D.III	Manajemen Transportasi Laut	Manajemen Transportasi Laut
9	Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten	D.III	Studi Nautika	Studi Nautika
		D.III	Studi Permesinan Kapal	Studi Permesinan Kapal
		D.III	Manajemen Transportasi Laut	Manajemen Transportasi Laut
10	Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara	D.III	Studi Nautika	Studi Nautika
		D.III	Studi Permesinan Kapal	Studi Permesinan Kapal
		D.III	Manajemen Transportasi Laut	Manajemen Transportasi Laut

- b. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat. Badan Pengembangan SDM Perhubungan tiap tahunnya menyelenggarakan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat. Penyusunan Pedoman Akademik ini bertujuan agar setiap UPT dibawah Kementerian Perhubungan memiliki program Penyelenggaraan Diklat yang sama. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Diklat dilakukan dengan menyelaraskan standar akademik pada masing-masing UPT Perhubungan;
- c. Penyusunan Standar Penelitian, bertujuan agar setiap UPT di bawah Kementerian Perhubungan memiliki standar penelitian yang sama dengan bekerja sama dengan Universitas ternama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam masalah pendidikan di bawah naungan Kementerian Perhubungan dan eratnya kerjasama dengan Universitas lain di luar ranah perhubungan

- d. Penyusunan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, bertujuan agar setiap UPT di bawah Kementerian Perhubungan memiliki standar pengabdian masyarakat yang sama. Penyusunan Standar Pengabdian Masyarakat harus dilakukan dengan benar agar dapat keluaran yang terbaik dalam sebuah UPT Perhubungan.
 - e. Pembinaan Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal melalui bimbingan teknis, seminar ataupun workshop untuk mempersiapkan UPT yang berdaya saing secara nasional dan internasional.
5. Kurikulum dan Silabus
- Amandemen terhadap *Standard Training Certification and Watchkeeping (STCW) 1978* pada tahun 2010 serta penyesuaian terhadap edisi 2017 berakibat terjadi penambahan kompetensi dan fungsi untuk pelaut sehingga kurikulum diklat kepelautan akan mengalami perubahan. Dalam menyikapi hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi serta sebagai pembina teknis UPT/ Sekolah-sekolah kepelautan, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut akan mengadakan workshop penyusunan/ reviu/ evaluasi kurikulum dan silabus, kegiatan ini bertujuan agar setiap UPT di bawah Kementerian Perhubungan memiliki program Penyelenggaraan Diklat yang terstandar dan *update* sesuai aturan dari IMO sehingga dapat menghasilkan lulusan diklat kepelautan yang kompeten dan berdaya saing internasional. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut sebagai Pembina teknis sekolah-sekolah kepelautan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusulkan pengembangan silabus dan diklat kepada Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Kegiatan dikemas dalam workshop dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya serta mengundang seluruh UPT diklat laut untuk berpartisipasi.

6. *Quick Wins*

Quick Wins (arahan Menhub dan prioritas arahan KepalaBPSDMP yang harus dialokasikan hingga tahun 2020) disajikan pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5 *Quick Wins* 2020-2024

NO	URAIAN KEGIATAN	PROGRAM	JUDUL
1	Pola Asuh	Pembinaan Pola Asuh taruna/ taruni UPT PPSDMPL	Focus Group Discussion Pembinaan Pola Asuh Taruna/ taruni
2	Penelitian Terapan untuk Vokasi	Pembinaan Penelitian pada UPT PPSDMPL	Workshop Pembinaan Kegiatan Penelitian Dosen

NO	URAIAN KEGIATAN	PROGRAM	JUDUL
3	Sinkronisasi Rencana Strategis	Pembinaan penyusunan RSB dan RBA UPT PPSDMPL	Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
4	Remunerasi	Pembinaan Penyusunan Dokumen Remunerasi UPT PPSDMPL	Penyusunan Dokumen Remunerasi
5	SKKNI, Standarisasi dan Sertifikasi Dosen	Workshop Penyusunan Okupasi SKKNI Kepelabuhanan	Workshop Penyusunan Okupasi SKKNI Kepelabuhanan
6	Konsistensi Dokumen Perencanaan	Renstra	Penyusunan Renstra
		RKT	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
		RKA	Penyusunan RKAKL Pagu Kebutuhan E-Planning
			Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif E-Planning
			Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran E-Planning
			Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi E-Planning
		PK	Penetapan Kinerja (PK)
6	Tim Kepatuhan Internal	- Penyusunan dan Implementasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	- Penyusunan dan Implementasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
		- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP
7	Quality Manajemen	- QMR	- QMR
8	Digitalisasi	- IPCamera/ CCTV	- IPCamera/ CCTV
		- Internet	- Internet

F. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berisi target pendapatan dan belanja (RM dan PNBPN) tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6. Kerangka Pendanaan PPSDMPL 2020-2024

NO	TAHUN	KEBUTUHAN ANGGARAN		
		TOTAL	RM	BLU/PNBPN
1	2020	30.380.219.000	29.365.147.000	1.015.072.000
2	2021	25.636.650.000	24.468.370.000	1.168.280.000

NO	TAHUN	KEBUTUHAN ANGGARAN		
		TOTAL	RM	BLU/PNBP
3	2022	27.328.466.000	25.924.342.000	1.404.124.000
4	2023	25.324.341.000	24.090.709.000	1.233.632.000
5	2024	244.914.508.098	243.758.358.098	1.156.150.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut ini disusun diharapkan dapat menjadi *living document* pengembangan SDM Perhubungan yang terbuka terhadap perkembangan secara berkesinambungan diperbaharui dengan mengacu pada analisis internal yang berupa Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), dan Analisis eksternal yang berupa Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threat*). Pemadanan kondisi eksternal dan internal merumuskan arah kebijakan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut di masa mendatang yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan dan peningkatan kurikulum.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan *roadmaps* yang menggambarkan kebijakan, strategi, sasaran strategis, indikator kinerja serta program kegiatan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit organisasi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan PPSDM Perhubungan Laut dalam rangka menyusun Renstra masing-masing unit kerjanya. Renstra di lingkungan PPSDM Perhubungan Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra BPSDM Perhubungan dalam mewujudkan visi “Terpenuhinya SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam mewujudkan konektivitas nasional”.

